

Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga: Suatu Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir

Caturida Meiwanto Doktoralina¹⁾, Sigit Mareta²⁾, Lestari³⁾

¹⁾ doktoralinacm@undira.ac.id, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara

²⁾ sigit.mareta@undira.ac.id, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara

³⁾ lestari@undira.ac.id, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara

Article Info:

Keywords:

Blue Economy, Community Empowerment, Development, SMEs

Article History:

Received : 07-12-2023
Revised : 05-09-2024
Accepted : 10-09-2024

Article Doi: [10.22441/jam.v10i1.24646](https://doi.org/10.22441/jam.v10i1.24646)

ABSTRACT

Indonesia's coastal areas hold immense potential for strengthening the national economy through the Blue Economy concept; however, limited skills and knowledge among coastal communities, particularly small and medium enterprise (SME) actors, remain a significant challenge. This Community Service Programme (PkM) aims to enhance the capacity of SME actors in Segarajaya Village, Bekasi, West Java, through training in business management, marketing, and household industry processing using information technology. The methods employed included a participatory approach with hands-on training, group discussions, and simulations of technology utilisation in business. The results indicated a significant improvement in participants' understanding of business management, marketing strategies, and technology optimisation to support productivity. A total of 40 participants successfully applied the new knowledge to the development of their household businesses. This programme has made a tangible contribution to empowering coastal communities and supporting sustainable economic efforts based on the Blue Economy concept.

How to cite: DOKTORALINA, Caturida Meiwanto et al. Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga: Suatu Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir. Jurnal Abdi Masyarakat (JAM), 10(1), 80-88. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/jam.v10i1.24646>.

ABSTRAK

Pesisir Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan ekonomi nasional melalui konsep Ekonomi Biru, namun keterbatasan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir, khususnya pelaku UMKM, menjadi tantangan utama. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat, melalui pelatihan manajemen bisnis, pemasaran, dan pengolahan industri rumah tangga berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif dengan pelatihan langsung, diskusi kelompok, dan simulasi penggunaan teknologi dalam bisnis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait pengelolaan usaha, strategi pemasaran, dan optimalisasi teknologi untuk mendukung produktivitas. Sebanyak 40 peserta berhasil mengaplikasikan pengetahuan baru ini ke dalam pengembangan usaha rumah tangga mereka. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan mendukung upaya keberlanjutan ekonomi berbasis Ekonomi Biru.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM.

PENDAHULUAN

Peningkatan temperatur global di lautan dan terjadinya bencana ekologis di kawasan pesisir mendorong lahirnya komitmen global untuk mengelola laut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab (Maipita, 2014). Konsep yang ditawarkan dan dapat diterapkan secara luas adalah prinsip Ekonomi Biru (Blue Economy). Konsep ini diharapkan menjadi titik balik untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan serta kesehatan ekosistem laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kawasan perairan yang luas serta populasi masyarakat yang dominan tinggal di kawasan pesisir. Oleh sebab itu, penerapan dan pengembangan ekonomi biru menjadi sangat relevan dan memiliki kepentingan strategis. Jika dilaksanakan secara konsisten, pendekatan ini tidak hanya akan mempercepat pemerataan kesejahteraan, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang. Sebagai contoh, dalam 20 tahun ke depan, ekonomi maritim diproyeksikan dapat berkontribusi hingga dua kali lipat terhadap ekonomi nasional, yaitu mencapai 12,45% (Junida dan Subagyo, 2021).

Komitmen Indonesia terhadap pembangunan ekonomi biru tidak hanya diwujudkan melalui rencana dan implementasi pembangunan nasional, tetapi juga tercermin dalam berbagai upaya diplomasi maritim. Lebih jauh lagi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang berperan penting dalam mendukung ekosistem laut global. Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten mendorong penguatan penerapan ekonomi biru di berbagai forum kelautan internasional dan regional. Langkah ini merupakan bagian penting dari diplomasi maritim, yang bertujuan untuk mendorong kerja sama pembangunan antara negara-negara kepulauan.

Istilah Blue Economy (BE) semakin populer dalam penelitian lingkungan modern. Secara konseptual, BE merupakan perwujudan dari green economy yang difokuskan pada tata kelola yang mendukung perikanan skala kecil (Ayilu et al., 2023). Kompleksitas dalam sistem kelautan menuntut penerapan pendekatan manajemen yang pragmatis, berorientasi tujuan, serta memberikan solusi yang realistis dan praktis (Burgess et al., 2018). Oleh sebab itu, konsep BE mengupayakan eksplorasi peluang pembangunan berbasis laut yang tetap menjaga dan melindungi lingkungan (Lee et al., 2020). Dengan demikian, BE diharapkan dapat menjadi salah satu paradigma ekonomi regional yang paling sering diterapkan di wilayah pesisir dan maritim secara global (Graziano et al., 2019).

Pengembangan dan pemberdayaan konsep BE berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, yang berkorelasi langsung dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat (Maipita, 2014). Selain itu, pendapatan alternatif yang dihasilkan dari penerapan BE dapat mengurangi ketergantungan pada aktivitas penangkapan ikan sebagai sumber penghidupan utama masyarakat pesisir (Cusack et al., 2021). Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan pendidikan lingkungan nonformal atau *Environmental Education* (EE). Pendidikan ini mendorong realisasi proyek-proyek masyarakat yang meningkatkan partisipasi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Pada akhirnya, menurut Zikargae et al. (2022) pendidikan mengenai lingkungan akan mengoptimalkan kinerja lingkungan, memperbaiki metode pertanian, dan meningkatkan kondisi mata pencaharian masyarakat pesisir

Muara Tawar adalah sebuah lokasi yang terletak di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Sebagian besar wilayah Segarajaya dimiliki oleh PLN untuk PLTU Muara Tawar yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Desa Segarajaya memiliki luas wilayah sebesar 7.793,85 Kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 15.000 jiwa, dengan tingkat kepadatan mencapai 51 jiwa per kilometer persegi. Salah satu objek wisata di desa ini adalah Jembatan Cinta Muara Tawar, yang menghubungkan Desa Segarajaya dengan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Muara Tawar.

Desa Segarajaya memiliki peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui konsep ekonomi biru. Penerapan ekonomi biru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga nelayan, khususnya melalui penjualan hasil tangkapan baik dalam bentuk bahan mentah maupun olahan masakan (Smith-Godfrey, 2016). Namun demikian, permasalahan utama di Desa Segarajaya adalah minimnya pelaku usaha UMKM yang mendapatkan pelatihan dan pengetahuan terkait manajemen bisnis serta pemasaran. Kondisi ini menuntut adanya pemberdayaan berkelanjutan untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Masyarakat pelaku UMKM di Desa Segarajaya menghadapi kendala berupa minimnya pelatihan bisnis, pemasaran, dan kesadaran lingkungan, meskipun memiliki potensi ekonomi besar dari hasil laut, tambak, dan ekowisata mangrove. Keberadaan PRPM belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan *community development* yang

terencana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan taraf hidup yang lebih baik.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan pendekatan partisipatif dengan serangkaian tahapan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra UMKM di Desa Segarajaya. Langkah-langkah pelaksanaan dan evaluasi program ini dirancang secara komprehensif sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Sebelum kegiatan dimulai, tim pengusul melaksanakan sosialisasi kepada perangkat desa, pelaku UMKM, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan kelembagaan, moril, dan materil dari semua pihak. Selanjutnya, dilakukan observasi lapangan dan wawancara untuk memetakan permasalahan yang dihadapi mitra. Data yang dikumpulkan meliputi jenis UMKM, kriteria UMKM, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tahapan ini memungkinkan solusi yang ditawarkan lebih relevan dengan kebutuhan mitra.

2. Tahap Pelaksanaan

Program dilaksanakan melalui workshop di Balai Nelayan, Desa Segarajaya, melibatkan perangkat desa, masyarakat, dan UMKM dengan sesi interaktif, tanya jawab, quiz, dan doorprize untuk menjaga antusiasme peserta yang terdiri atas sesi berikut:

- a. Edukasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dilakukan untuk peningkatan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sampah.
- b. Pelatihan Pemasaran Digital bertujuan mengajarkan teknik pemasaran online untuk meningkatkan daya saing UMKM.
- c. Pelaksanaan pelatihan Laporan Keuangan:

Hari : Minggu, 08 Oktober 2023

Mitra : 40 orang pelaku usaha Desa Segara Jaya

Durasi : Keseluruhan kegiatan 6 bulan dan 6 Jam pelaksanaan kegiatan.

Tempat : Balai Nelayan, Desa Segara Jaya, Bekasi

3. Dukungan dan Partisipasi Mitra dan Tahap Evaluasi

Mitra mendukung kegiatan melalui pendataan UMKM, penyediaan tempat, dan ajakan partisipasi. Evaluasi menggunakan kuesioner untuk mengukur efektivitas program, didukung alat seperti proyektor, audio, laptop, serta modul pelatihan dan

doorprize dalam rangka mengukur pemahaman dan kepuasan peserta terhadap program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Biru

Pemerintah telah menetapkan dua kebijakan strategis, yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru (KPEB), sebagai langkah untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. KKI mengamanatkan penataan ruang wilayah pesisir melalui zonasi konservasi, yang mencakup indikator kuantitatif terkait area perlindungan ekosistem laut yang diidentifikasi dan dipertahankan. Upaya ini bertujuan melindungi ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan konservasi, keberlanjutan, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas eksploitasi seperti perikanan dan pengambilan mineral. Selain itu, KKI mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan serta penggunaan teknologi canggih untuk pengelolaan sumber daya laut.

Pada tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru (KPEB) untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan. Strategi KPEB meliputi penguatan tata kelola laut, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kedua kebijakan ini selaras dengan berbagai regulasi nasional, seperti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU No. 27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Implementasinya membutuhkan pendekatan integrasi antar sektor, antar wilayah darat dan laut, serta antara tingkat pemerintahan. Dimensi integrasi ini memastikan optimalisasi sumber daya untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, yang menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi biru.

Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga, terutama di wilayah pesisir, sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Sebagai contoh, survei di Desa Segarajaya menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga nelayan memiliki pendapatan rata-rata jauh di bawah standar hidup layak. Gordon dan Haq (1978) menyebutkan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, sementara Weisskoff dan Wolff (1981) menyoroti pentingnya peran pekerja dan pembiaya dalam mendukung ekonomi

keluarga. Faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga (Berkman dan Macintyre, 1997; Falkingham dan Namazoe, 2002; Sahn dan Stifel, 2003; Xavier et al., 2003; Yadollahi dan Paim, 2010). Pendapatan ini biasanya diukur secara bulanan atau tahunan dan menjadi indikator utama status ekonomi keluarga.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran (Peraturan Menteri Desa, 2022). Hasil pelatihan menunjukkan bahwa 65% peserta mengalami peningkatan pengetahuan terkait pemasaran digital dan pelestarian lingkungan. Data ini diukur melalui evaluasi pascapelatihan yang menggunakan skala Likert 1-5. Pemberdayaan ini dalam perspektif Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat, terutama melalui pengembangan potensi kewirausahaan. Langkah keberhasilan pemberdayaan diukur dari peningkatan ekonomi, akses kesejahteraan, dan kemampuan kultural masyarakat. Faktor kekuasaan (power) dalam pemberdayaan mencakup kekuatan individu untuk berubah (power within), kemampuan individu (power to), pengaruh terhadap hambatan sumber daya (power over), dan aksi kolektif (power with) (Totok Mardikanto dan Soebianto, 2012).

Sikap dan Perilaku Produktif

Konsep hexa-helix digunakan untuk mendorong produktivitas masyarakat melalui sinergi antara pemerintah, swasta, intelektual, komunitas kreatif, media, dan investor. Pemerintah berperan sebagai regulator, swasta sebagai pelaksana bisnis, dan komunitas kreatif sebagai penggerak kegiatan yang bertransformasi menjadi kewirausahaan kreatif. Media mendukung promosi, sedangkan investor memperkuat modal. Pemberdayaan ini dalam perspektif Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat, terutama melalui pengembangan potensi kewirausahaan (Mehrabian dan Russell, 1974).

Tujuan dan Manfaat

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta tentang teknologi dan seni (IPTEKS) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk,

efisiensi, dan daya saing UMKM, serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Manfaatnya meliputi kontribusi akademik, seperti memperluas wawasan tentang pentingnya kesadaran lingkungan, dan kontribusi manajerial, seperti meningkatkan pendapatan UMKM melalui pemasaran digital dan pengembangan platform usaha.

Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil

Evaluasi dilakukan melalui pemantauan progres UMKM di marketplace, jumlah produk yang terjual, dan laporan keuangan. Sebagai hasil, sebanyak 12 UMKM baru berhasil mendaftar di marketplace, dengan peningkatan rata-rata omset sebesar 15% dalam tiga bulan pascapelatihan. Hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan mencakup keterbatasan perangkat teknologi di lapangan, kurangnya literasi digital peserta, serta waktu pelaksanaan yang terbatas. Selain itu, dokumentasi kegiatan telah dipublikasikan dalam [Berita](#), [Video](#), [Hak Kekayaan Intelektual](#).

Tahapan Selanjutnya

Tahapan berikutnya melibatkan penyusunan laporan akhir dan evaluasi internal untuk memastikan keberlanjutan program. Rencana luaran meliputi publikasi di jurnal ilmiah, pengembangan kerja sama dengan mitra, dan peningkatan kapasitas UMKM untuk mendukung ketahanan nasional.

KESIMPULAN

Pengamatan tim melalui survei lapangan dan diskusi selama pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan perpustakaan sangat diminati masyarakat, terlihat dari antusiasme peserta dan usulan untuk memperpanjang durasi pelatihan. Kegiatan telah berhasil memberikan pemahaman tentang pelestarian lingkungan di kawasan wisata Jembatan Cinta Desa Segara Jaya, serta meningkatkan wawasan peserta mengenai IPTEKS untuk mendukung produktivitas, kualitas produk, dan daya saing UMKM melalui manajemen bisnis dan pemasaran digital. Pelatihan ini juga membuktikan efektivitasnya dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui penerapan konsep ekonomi biru.

SARAN

Program pengabdian masyarakat ini disarankan untuk dilanjutkan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama nelayan, dalam pengelolaan usaha dan pemahaman konsep ekonomi biru. Universitas Dian Nusantara

melalui Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat diharapkan terus mendukung kegiatan ini sesuai Rencana Induk Riset Nasional untuk memastikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

REFERENSI

- Ayilu, R. K., Fabinyi, M., Barclay, K., dan Bawa, M. A. (2023). Blue economy: industrialisation and coastal fishing livelihoods in Ghana. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 1–18. <https://doi.org/10.1007/s11160-022-09749-0>
- Berkman, L. F., dan Macintyre, S. (1997). The measurement of social class in health studies: old measures and new formulations. *IARC Scientific Publications*, 138, 51–64.
- Burgess, M. G., Clemence, M., McDermott, G. R., Costello, C., dan Gaines, S. D. (2018). Five rules for pragmatic blue growth. *Marine Policy*, 87, 331–339.
- Cusack, C., Sethi, S. A., Rice, A. N., Warren, J. D., Fujita, R., Ingles, J., Flores, J., Garchitorena, E., dan Mesa, S. V. (2021). Marine ecotourism for small pelagics as a source of alternative income generating activities to fisheries in a tropical community. *Biological Conservation*, 261, 109242.
- Falkingham, J., dan Namazoe, C. (2002). Measuring Health and Poverty. *Dfid*, 44(0).
- Gordon, J. K., dan Haq, M. ul. (1978). The Poverty Curtain: Choices for the Third World. *International Journal*, 34(1). <https://doi.org/10.2307/40201739>
- Graziano, M., Alexander, K. A., Liesch, M., Lema, E., dan Torres, J. A. (2019). Understanding an emerging economic discourse through regional analysis: Blue economy clusters in the US Great Lakes basin. *Applied Geography*, 105, 111–123. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2019.02.013>
- Junida, A. I., dan Subagyo. (2021). Kontribusi ekonomi maritim ditargetkan capai 12.5 persen pada 2045. <https://www.antaranews.com/Berita/2310122/Kontribusi-Ekonomi-Maritim-Ditargetkan-Capai-125-Persen-Pada-2045>, 1–4. <https://www.antaranews.com/berita/2310122/kontribusi-ekonomi-maritim-ditargetkan-capai-125-persen-pada-2045>
- Lee, K.-H., Noh, J., dan Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137, 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat, 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/241000/permendesa-pdtt-no-11-tahun-2022>
- Sahn, D. E., dan Stifel, D. (2003). Exploring alternative measures of welfare in the absence of expenditure data. *Review of Income and Wealth*, 49(4), 463–489.
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- Totok Mardikanto, dan Soebianto, P. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. In *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab* (Vol. 1, Issue 1).
- Weisskoff, R., dan Wolff, E. N. (1981). The structure of income inequality in Puerto Rico. *Journal of Development Economics*, 9(2), 205–228. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(81\)90037-7](https://doi.org/10.1016/0304-3878(81)90037-7)
- Xavier, F. M. F., Ferraz, M. P. T., Marc, N., Escosteguy, N. U., dan Moriguchi, E. H. (2003). Elderly people's definition of quality of life. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 25(1). <https://doi.org/10.1590/S1516-44462003000100007>
- Yadollahi, M., dan Paim, L. H. (2010). Measurement of Family Economic Status. *Journal of American Science*, 6(11), 756–760.

Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., dan Skjerdal, T. (2022). Empowering rural society through non-formal environmental education: An empirical study of environment and forest development community projects in Ethiopia. *Heliyon*, 8(3), e09127. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09127>